

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi, Kebijakan, Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media, Jakarta.
- Amari, Mohammad & Asep N. Mulyana, 2010, *Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Agoes, Suryadi, *et al*, 2013, *Peranan BPK dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Kejaksaan Agung Pusat Penelitian dan Pengembangan, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arief, Basrief, 2006, *Korupsi, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.
- Arrasjid, Chainur, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2015, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (Offender)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bahar, Wahyuni, *et al*, 2007, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Prosiding Seminar Tindak Pidana Perbankan : Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Centre For Finance, Investment And Securities Law (CSISEL), Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Effendy Marwan, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan isu-isu aktual dalam kejahatan finansial dan korupsi*, Referensi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Tangerang.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, 2006, *Kamus Indonesia Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*, PT Gramedia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gamer, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomson West, Massachusetts.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Krisnawati, Dani, *et al.*, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Refika Aditama, Bandung.

- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Mertokusomo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2012, *Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Nirwanto, D. Andhi, 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Neloe, E.C.W., 2012, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, Jakarta.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel, 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media, Bandung.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2016, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Depok.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T., 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Schaffmeister, D., et al, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melwan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Tuanakotta, Theodorus M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Termohujan, Majanne, 2002, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia*, Jembatan, Jakarta.
- Wiyono, R. 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuntho, Emerson, et al., 2014, *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Delik Tindak Pidana Korupsi Policy Paper Indonesia Corruption Watch 2014*, ICW, Jakarta.
- Yusuf, Muhamamad, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041).

Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal KPK tentang Pemetaan 10 (sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012, Jakarta, tanggal 29 Maret 2012.

### **C. Makalah**

Adji, Indriyanto Seno, “Administrative Penal Law Kearah Konstruksi Pidana Limitatif”, *Makalah*, The Rich Hotel, Yogyakarta, 23 Februari 2014.

Effendy, Marwan, “Apakah Suatu Kebijakan Dapat Di Kriminalisasi (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi)”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar, dengan tema "Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum". yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA). di Hotel Bumi Karsa Bidakara – Jakarta, Selasa 11 Mei 2010.

#### D. Karya Ilmiah

Yustisia, Anggraini Dian, 2008, *Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana di bidang Perbankan pada Bank BUMN*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### E. Jurnal, Majalah dan Koran

Ifrani, “Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Perbankan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, Desember 2011.

Zulkarnain Sitompul, “Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Money Laundering)”, *Reformasi Hukum*, Vol. VII, No.2, Juli-Desember 2004.

Yudi Kristiana, “Ketika Hukum Tidak Lagi Otentik”, *Jurnal Hukum Supremasi*, Vol. IV, No. I, Oktober 2010.

Widyo Pramono, “Menyikapi Prinsip “Business Judgment Rule” Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Warta Badiklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI*, Tahun 3 - edisi 11-2015

Eddy O.S. Hiarij, “Pasal Keranjang Sampah”, *Kompas*, edisi 7 Mei 2015.

Komariah Emong Sapardjaja, “Rumusan Hasil Diskusi Bidang Pidana”, *Varia Peradilan*, Vol. 22, No. 263, Oktober 2007.

#### F. Internet

Akuntan Online, 8 Oktober 2013, “80 persen korupsi terjadi di BUMN dan Yayasan”, <http://www.akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=792&t=80%20Persen%20Korupsi%20Terjadi%20di%20BUMN%20&Yayasan&kat=Hukum>, diakses 15 Nopember 2015.

Tempo.co, Selasa 28 Januari 2014, “empat sektor rawan korupsi jelang pemilu 2014” ,[http: nasional. tempo.co/read/](http://nasional.tempo.co/read/)

*news/2014/01/28/063548920/ empat-sektor-rawan-korupsi-jelang-pemilu-2014*, diakses 15 Nopember 2014.

Zulkarnaen Sitompul, “Seluk Beluk Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Perbankan”, <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/tipikor/>, diakses 15 Nopember 2015.

Eddy OS Hiariej, “Anotasi Putusan Neloe Dkk 1144 K/Pid/2006”, <http://indekshukum.org/catalog/detail/c2acb89e-e77c-177c-e6ff-323331363230.html>, diakses 21 Nopember 2015.

Alvi Ayahrin, “Asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis”, <http://alviprofdr.blogspot.co.id/2013/07/asas-lex-specialis-derogat-lege.html#more>, diakses pada tanggal 16 Nopember 2015.

“Pengertian, Ciri dan Contoh BUMN”, <http://www.pengertianahli.com/2014/06/pengertian-ciri-contoh-bumn.html#>, diakses tanggal 5 April 2016.

Indriyanto Seno Adji, “Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara”, <http://jambilawclub.blogspot.co.id/2011/12/korupsi-kriminalisasi-kebijakan.html>, diakses 20 Maret 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses tanggal 27 Mei 2016

## **G. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, perihal pengujian Undang-undang Keuangan Negara, 18 September 2014.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1144/K/PID/2006 tanggal 13 September 2007.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1052 K/Pid/2006 tanggal 24 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 116 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 22 maret 2011.